

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROSES SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh

ANNISYA TRY RAMADHANI

1710112023

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Henni Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELAKSANAAN PROSES SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

ABSTRAK

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah implementasi dari kedaulatan rakyat di negara demokrasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan. Penyelenggara yang dimaksud terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Penyelenggara Pemilu mengatur jalan dan menetapkan peserta Pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang dari Pemilu, sehingga Penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menyukseskan Pemilu maupun Pilkada. Komisi Pemilihan Umum sebagai tonggak penyelenggara pemilihan memiliki wewenang membentuk peraturan KPU yang berguna untuk mengatur pelaksanaan dari kegiatan pemilihan dan dapat membentuk PPK, PPS, dan KPPS yang bersifat sementara. Pada proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS memberikan persyaratan dan formulir untuk keikutsertaan dalam keanggotaan penyelenggara tersebut. Namun, persyaratan tersebut belum menjadi tolak ukur dan jaminan dalam proses seleksi di lapangan, adanya perekrutan yang tidak merata pada Pemilu Serentak 2019 menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaan perekrutan pada Pilkada 2020 yang disertai dengan Pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penerapan ketentuan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah pada proses penyeleksian? *kedua*, Bagaimana proses pelaksanaan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan sumber data yang didapat berasal dari hasil wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan sosialisasi pada tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS merupakan wadah yang sangat penting agar partisipasi dari masyarakat meningkat. Kegiatan sosialisasi seperti Orientasi Tugas, Bimbingan Teknis, dan Rapat Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPU kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Terjadinya Pandemi Covid-19 berakibat pada perubahan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang mengharuskan KPU Kota Bukittinggi mengikuti dan mempedomani peraturan tentang pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.